

**EVALUASI CAPAIAN KINERJA SUBKEGIATAN PENDUKUNG ASTACITA
PADA PELAKSANAAN RKPD PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Tahun 2025**

1 MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

No	Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100%	9	10			
					K	Rp	K	Rp	K	%		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			780.280.000	877.257.000	25	112,43				
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			780.280.000	877.257.000	25	112,43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
		Menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman bagi masyarakat, serta menegakkan hukum di lingkungan masyarakat					25					
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			326.960.000	424.470.000	25	129,82				
		Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	12			3		25			
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban										

8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			4.652.690.277	4.842.678.680	50	104,08		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			3.574.009.500	3.574.532.290	0	100,01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Meningkatnya etika dan budaya politik					0			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala			3.574.009.500	3.574.532.290	0	100,01		
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	36	0		0			
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta			3.574.009.500	3.574.532.290	0	100,01		
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	36	0		0			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.078.680.777	1.268.146.390	100	117,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan					100			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			1.078.680.777	1.268.146.390	100	117,56		
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	60	60		100			
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas			1.078.680.777	1.268.146.390	100	117,56		
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	60	60		100			
	JUMLAH			5.432.970.277	5.719.935.680				
	Rata-rata capaian kinerja (%)					37,5	105,28		SUB KEGIATAN
	Predikat kinerja					Sangat Renda	Sangat tinggi		

2 MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI KREATIF, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU

No		Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6 x 100%	9	10
					K	Rp	K	Rp	K	%	
UEI		1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			16.371.387.735		15.746.352.496	65,4	96,18	
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			16.371.387.735		15.746.352.496	65,4	96,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Terpenuhinya pelayanan air bersih						65,4		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			16.371.387.735		15.746.352.496	65,4	96,18	
			Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penvediaan Air Minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (l iter/Defik)	10,2		10,2		100		
				Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1575		485		30,79		
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			12.604.270.535		13.168.447.296	100	104,48	
			Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (l iter/Defik)	10,2		10,2		100		
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			3.767.117.200		2.577.905.200	30,79	68,43	
			Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1575		485		30,79		
		2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			73.487.700		50.712.700	63,8	69,01	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			33.778.400		17.888.400	102,6	52,96	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
			Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						102,6		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka			33.778.400		17.888.400	102,6	52,96	
			Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2000		2.052		102,6		
		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			33.778.400		17.888.400	102,6	52,96	

	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2000		2.052		102,6			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			39.709.300		32.824.300	25	82,66	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
	Terwujudnya Peningkatan Taban Pangan					25				
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			39.709.300		32.824.300	25	82,66		
	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12		3	25				
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			39.709.300		32.824.300	25	82,66		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12		3	25				
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			35.337.860.193		43.796.790.046	109,42	123,94		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			316.613.000		313.265.200	100	98,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Terkendalnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan					100				
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			316.613.000		313.265.200	100	98,94		
	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	75		75	100				
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			316.613.000		313.265.200	100	98,94		
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	75		75	100				
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			35.021.237.193		43.483.524.846	111,78	124,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan					111,78				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			35.021.237.193		43.483.524.846	111,78	124,16		
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	107123.85		137.907,95	128,74				
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	100		70	70				

		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	559,86		669,84		119,64		
		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74		
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			10.641.172.854		10.446.210.111	128,74	98,17	
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74		
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			9.453.710.408		9.402.578.908	70	99,46	
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	100		70		70		
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST			2.433.232.008		2.336.775.049	119,64	96,04	
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	559,86		669,84		119,64		
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			12.493.121.923		21.297.960.778	128,74	170,48	
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			19.600.000		18.657.600	125	95,19	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			19.600.000		18.657.600	125	95,19	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap						125		
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			19.600.000		18.657.600	125	95,19	
	Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30		0		0		

			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	2		5		250			
3.25.03.2.02.0001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			9.600.000		9.511.600	0	99,08		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	30		0		0			
3.25.03.2.02.0002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			10.000.000		9.146.000	250	91,46		
		Terjaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	2		5		250			
		JUMLAH			51,802,325,628		59,612,512,842				
		Rata-rata capaian kinerja (%)						95,96	115,08		
		Predikat kinerja						Sangat tinggi	Sangat tinggi		SUB KEGIATAN

3 MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI

No		Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6 x 100%		9	10
					K	Rp	K	Rp	K	%		
		2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			3.719.334.957		4.706.955.470	58,25	126,55		
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (L.L.A.J)			2.990.895.777		4.043.032.540	74,74	135,18	DINAS PERHUBUNGAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						74,74			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.990.895.777		4.043.032.540	74,74	135,18		
			Tersedianya dan terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	289		216		74,74			
		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.990.895.777		4.043.032.540	74,74	135,18		
			Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	289		216		74,74			

2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			728.439.180		663.922.930	50	91,14	DINAS PERHUBUNGAN	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai						50			
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			728.439.180		663.922.930	50	91,14		
	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pada pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5		5		100			
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	1		0		0			
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			678.629.180		618.976.130	100	91,21		
	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5		5		100			
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			49.810.000		44.946.800	0	90,24		
	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	1		0		0			
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			6.650.000		6.120.224	60	92,03		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			6.650.000		6.120.224	60	92,03	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri						60			
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro			6.650.000		6.120.224	60	92,03		
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100		60		60			
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			6.650.000		6.120.224	60	92,03		
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	100		60		60			
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.125.956.000		1.148.057.991	126,33	101,96		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.066.498.000		1.089.418.991	89,5	102,15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Mengalami						89,5			
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.066.498.000		1.089.418.991	89,5	102,15		
	Tercapainya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6		6		100			
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		79		79			
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			746.400.000		773.308.791	100	103,61		

	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6		6		100			
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			320.098.000		316.110.200	79	98,75		
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		79		79			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			59.458.000		58.639.000	200	98,62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya						200			
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			59.458.000		58.639.000	200	98,62		
	Tercapainya Penetapan Cagar Budaya Peringkat	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1		2		200			
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			59.458.000		58.639.000	200	98,62		
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1		2		200			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			-		175.783.750	0	0		
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			-		155.569.250	0	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata yang ditetapkan						0			
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		155.569.250	0	0		
	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0		1		0			
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			-		155.569.250	0	0		
	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	0		1		0			
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			-		20.214.500	0	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	
	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersertifikat HKI						0			
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			-		20.214.500	0	0		
	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0		1		0			

3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			-	20.214.500	0	0		
	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	0	1		0			
JUMLAH			4,851,940,957		6,036,917,435				
Rata-rata capaian kinerja (%)						87,68	124,42		
Predikat kinerja						Tinggi	Sangat tinggi		SUB KEGIATAN

4 MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS

No		Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket		
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6 x 100%	9	10
					K	Rp	K	Rp	K	%	
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						0	0	
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Meningkatnya Iklim Inklusivitas, Iklim Keamanan Iklim						0		
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0	0	
			Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0		
		1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						0	0	
			Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		0		
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			69.304.365.704		65.941.899.646	100	95,15	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			68.859.633.454		65.539.788.946	100	95,18	DINAS KESEHATAN	

	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan					100			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		8.651.872.373		4.861.461.855	100	56,19		
	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPT yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	4		100			
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		8.651.872.373		4.861.461.855	100	56,19		
	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	4	4		100			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		60.207.761.081		60.678.327.091	100	100,78		
	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	24	24		100			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12		100			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	12		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		721.379.900		643.492.293	100	89,2		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	24	24		100			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		59.486.381.181		59.998.734.798	100	100,86		
	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	12	12		100			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				36.100.000	0	0		
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	12		0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		101.088.000		83.479.800	0	82,58	Puskesmas Purnama	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan					0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		101.088.000		83.479.800	0	82,58		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	0		0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	0		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		99.288.000		83.029.800	0	83,63		

	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.800.000		450.000	0	25	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			63.400.000		44.500.000	0	70,19	Puskesmas St.Hulu
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan					0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			63.400.000		44.500.000	0	70,19	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0	0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			61.000.000		44.000.000	0	72,13	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.400.000		500.000	0	20,83	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			67.248.000		57.780.900	0	85,92	Puskesmas Khatulistiwa
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan					0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			67.248.000		57.780.900	0	85,92	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0	0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			65.748.000		56.480.900	0	85,91	
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.500.000		1.300.000	0	86,67	
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0	0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			28.600.000		64.700.000	0	226,22	Puskesmas Telaga Biru
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan					0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.600.000		64.700.000	0	226,22	

	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			26.800.000		63.300.000	0	236,19		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			1.800.000		1.400.000	0	77,78		
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			27.666.000		24.760.000	0	89,5	Puskesmas Saigon	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan						0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			27.666.000		24.760.000	0	89,5		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			27.216.000		24.360.000	0	89,51		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			450.000		400.000	0	88,89		
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			39.415.000		37.000.000	0	93,87	Puskesmas Banjar Serasan	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan						0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			39.415.000		37.000.000	0	93,87		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			38.815.000		36.600.000	0	94,29		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			600.000		400.000	0	66,67		

	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			69.604.000		50.750.000	0	72,91	Puskesmas Perum II	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan						0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			69.604.000		50.750.000	0	72,91		
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			44.104.000		29.900.000	0	67,79		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			25.500.000		20.850.000	0	81,76		
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			47.711.250		39.140.000	0	82,04	Puskesmas Pal 3	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan						0			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47.711.250		39.140.000	0	82,04		
	Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			45.611.250		37.040.000	0	81,21		
	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0		0		0			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			2.100.000		2.100.000	0	100		
	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		0		0			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			327.061.600		433.154.694	117,86	132,44		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			27.061.600		16.976.600	85,71	62,73	DINAS SOSIAL	
	Meningkatnya Kompetensi PSKS						85,71			
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			27.061.600		16.976.600	85,71	62,73		
	Terselenggaranya Pengembangan PSKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	7		6		85,71			

1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		27.061.600		16.976.600	85,71	62,73		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	7	6		85,71			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		300.000.000		416.178.094	150	138,73	DINAS SOSIAL	
	Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal					150			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000		416.178.094	150	138,73		
	Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	150		150			
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		300.000.000		416.178.094	150	138,73		
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	150		150			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		1.096.078.400		997.951.960	55,48	91,06		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		622.100.000		594.710.560	68,89	95,6	DINAS TENAGA KERJA	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja					68,89			
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		622.100.000		594.710.560	68,89	95,6		
	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	270	186		68,89			
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		622.100.000		594.710.560	68,89	95,6		
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	270	186		68,89			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		473.978.400		403.241.400	48,77	85,08	DINAS TENAGA KERJA	
	Meningkatnya Pekerja yang Terdidik					48,77			
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam		27.246.400			0	0		
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	0		0			
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		27.246.400			0	0		

	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30		0		0			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah			446.732.000		403.241.400	97,54	90,26		
	Terlaksananya Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Mogok Kerja dan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	6230		6.077		97,54			
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			446.732.000		403.241.400	97,54	90,26		
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	6230		6.077		97,54			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			42.300.000		33.600.000	66,67	79,43		
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			13.500.000		12.000.000	100	88,89	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Meningkatkan Pasangan Usia Subur yang ber KB						100			
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah			13.500.000		12.000.000	100	88,89		
	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2		2		100			
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan			13.500.000		12.000.000	100	88,89		
	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	2		2		100			
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			28.800.000		21.600.000	50	75	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Penguatan kapasitas dan keberfungsian kelompok						50			
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			28.800.000		21.600.000	50	75		

[illegible]

5 MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI

No	Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100%	9	10			
					K	Rp	K	Rp	K	%		
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				16.371.387.735		15.746.352.496	65,4	96,18		
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				16.371.387.735		15.746.352.496	65,4	96,18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Terpenuhinya pelayanan air bersih							65,4			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				16.371.387.735		15.746.352.496	65,4	96,18		
		Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (1 liter/Detik)	10,2			10,2		100			
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1575			485		30,79			
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				12.604.270.535		13.168.447.296	100	104,48		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (1 liter/Detik)	10,2			10,2		100			
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				3.767.117.200		2.577.905.200	30,79	68,43		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1575			485		30,79			
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				3.719.334.967		4.706.955.470	58,25	126,55		
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				2.990.895.777		4.043.032.540	74,74	135,18	DINAS PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat							74,74			
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.990.895.777		4.043.032.540	74,74	135,18		
		Tersedianya dan terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	289			216		74,74			
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.990.895.777		4.043.032.540	74,74	135,18		
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	289			216		74,74			
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				728.439.180		663.922.930	50	91,14	DINAS PERHUBUNGAN	

	Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai					50			
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau		728.439.180		663.922.930	50	91,14		
	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pada pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5			100			
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	1			0			
2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		678.629.180		618.976.130	100	91,21		
	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5			100			
2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		49.810.000		44.946.800	0	90,24		
	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	1			0			
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		32.000.000		31.899.000	100	99,68		
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		32.000.000		31.899.000	100	99,68	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal					100			
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		32.000.000		31.899.000	100	99,68		
	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	6			100			
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	35			100			
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		12.000.000		11.956.000	100	99,63		
	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	6			100			
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal		20.000.000		19.943.000	100	99,72		

	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	35		35		100			
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						0	0		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						0	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan						0			
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan						0	0		
	Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1		0		0			
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)						0	0		
	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	1		0		0			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			326.428.100		312.263.770	33,33	95,66		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			293.928.100		275.813.294	100	93,84	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri						100			
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			293.928.100		275.813.294	100	93,84		
	Tersusunnya Dokumen RPIK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		100			
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			293.928.100		275.813.294	100	93,84		
	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		1		100			

3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			32.500.000		36.450.476	0	112,16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian						0			
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Industri (IPIK)			32.500.000		36.450.476	0	112,16		
	Meningkatnya Izin Industri yang Sesuai Ketentuan	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		0		0			
		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		0		0			
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			32.500.000		36.450.476	0	112,16		
		~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		0		0			
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan						0	0		

		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SII Nas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SII Nas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1		0		0			
		JUMLAH			20,449,150,792		20,797,470,736				
		Rata-rata capaian kinerja (%)						55,05	101,7		
		Predikat kinerja						Rendah	Sangat tinggi		SUB KEGIATAN

6 MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

No		Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6 x 100%		9	10
					K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.478.119.000		3.377.346.000	97,7	97,1		
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			3.478.119.000		3.377.346.000	97,7	97,1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya jumlah rumah layak huni						97,7			
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			3.478.119.000		3.377.346.000	97,7	97,1		

	Terwujudnya Realisasi unit RTLH yang disediakan diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	217		212		97,7			
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			3.478.119.000		3.377.346.000	97,7	97,1		
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	217		212		97,7			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			327.061.600		433.154.694	117,86	132,44		
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			27.061.600		16.976.600	85,71	62,73	DINAS SOSIAL	
	Meningkatnya Kompetensi PSKS						85,71			
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			27.061.600		16.976.600	85,71	62,73		
	Terselenggaranya Pengembangan PSKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	7		6		85,71			
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			27.061.600		16.976.600	85,71	62,73		
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	7		6		85,71			
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			300.000.000		416.178.094	150	139,73	DINAS SOSIAL	
	Penyaluran Bantuan Sosial yang optimal						150			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		416.178.094	150	139,73		
	Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		150		150			
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			300.000.000		416.178.094	150	139,73		
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		150		150			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			1.096.078.400		997.951.960	55,48	91,05		

2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			622.100.000	594.710.560	68,89	95,6	DINAS TENAGA KERJA	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja					68,89			
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			622.100.000	594.710.560	68,89	95,6		
	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	270	186		68,89			
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			622.100.000	594.710.560	68,89	95,6		
	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	270	186		68,89			
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			473.978.400	403.241.400	48,77	85,08	DINAS TENAGA KERJA	
	Meningkatnya Pekerja yang Terdidik					48,77			
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam			27.246.400		0	0		
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	0		0			
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			27.246.400		0	0		
	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	0		0			
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah			446.732.000	403.241.400	97,54	90,26		
	Terlaksananya Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Mogok Kerja dan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	6230	6.077		97,54			
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			446.732.000	403.241.400	97,54	90,26		
	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	6230	6.077		97,54			
	JUMLAH			4.901.259.000	4.808.452.654				
	Rata-rata capaian kinerja (%)					83,31	98,11		SUB KEGIATAN
	Predikat kinerja					Tinggi	Sangat tinggi		

7 MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUDUPAN

No	Kode	Tematik/ Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100%	9	10			
					K	Rp	K	Rp	K	%		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.652.690.277		4.842.678.680	50	104,08		
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.574.009.500		3.574.532.290	0	100,01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya etika dan budaya politik							0			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		36		3.574.009.500	0	3.574.532.290	0	100,01		
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Terselaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		36		3.574.009.500	0	3.574.532.290	0	100,01		
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				1.078.680.777		1.268.146.390	100	117,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan							100			
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi				1.078.680.777		1.268.146.390	100	117,56		

	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	12		3		25			
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			453.320.000		452.787.000	25	99,88		
	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Restoratif, Non Yustisi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12		3		25			
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			453.320.000		452.787.000	25	99,88		
	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12		3		25			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			35.337.850.193		43.796.790.046	109,42	123,94		
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			316.613.000		313.265.200	100	98,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan						100			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			316.613.000		313.265.200	100	98,94		
	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	75		75		100			
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			316.613.000		313.265.200	100	98,94		
	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	75		75		100			
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			35.021.237.193		43.483.524.846	111,78	124,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan						111,78			

2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			35.021.237.193		43.483.524.846	111,78	124,16		
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74			
		Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	100		70		70			
		Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	559,86		669,84		119,64			
		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74			
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			10.641.172.854		10.446.210.111	128,74	98,17		
	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74			
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			9.453.710.408		9.402.578.908	70	99,46		
	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	100		70		70			
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST			2.433.232.008		2.336.775.049	119,64	96,04		
	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	559,86		669,84		119,64			
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			12.493.121.923		21.297.960.778	128,74	170,48		
	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	107123,85		137.907,95		128,74			
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.125.956.000		1.148.057.991	126,33	101,96		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.066.498.000		1.089.418.991	89,5	102,15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya Kebudayaan Lokal yang Menjalami						89,5			

2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.066.498.000		1.069.418.991	89,5	102,15		
	Tercapainya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6		6		100			
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		79		79			
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			746.400.000		773.308.791	100	103,61		
	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	6		6		100			
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			320.098.000		316.110.200	79	98,75		
	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	100		79		79			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			59.458.000		58.639.000	200	98,62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya						200			
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			59.458.000		58.639.000	200	98,62		
	Tercapainya Penetapan Cagar Budaya Peringkat	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1		2		200			
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			59.458.000		58.639.000	200	98,62		
	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1		2		200			
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			54.457.600		51.784.600	100	95,09		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			54.457.600		51.784.600	100	95,09	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						100			
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			52.871.600		50.224.600	100	94,99		
	Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/ kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		10		100			
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			52.871.600		50.224.600	100	94,99		
	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		10		100			
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			1.586.000		1.560.000	100	98,36		
	Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/ kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pencatatan)	10		10		100			

2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN		1.586.000		1.560.000	100	98,36		
	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pendukung)	10	10		100			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		4.662.690.277		4.842.678.680	50	104,08		
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		3.574.009.500		3.574.532.290	0	100,01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Meningkatnya etika dan budaya politik					0			
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		3.574.009.500		3.574.532.290	0	100,01		
	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	36	0		0			
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		3.574.009.500		3.574.532.290	0	100,01		
	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	36	0		0			
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		1.078.680.777		1.268.146.390	100	117,56	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan					100			
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi		1.078.680.777		1.268.146.390	100	117,56		
	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	60	60		100			
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,		1.078.680.777		1.268.146.390	100	117,56		

		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	60		60		100			
			JUMLAH		41,951,234,070		50,716,568,317				
			Rata-rata capaian kinerja (%)					91,15	120,89		
			Predikat kinerja					Sangat tinggi	Sangat tinggi		SUB KEGIATAN

Pontianak, 15 September 2026

Plh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak



Edy Purwanto, S.E., M.E., C.CLE., CHCM., CFAM
 Pembina Tingkat I - IV/b
 NIP. 19730518 199503 1 003